

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari ketepatan waktu wajib pajak dalam membayar dan menyampaikan jumlah SPT Tahunan PPh Badan.
2. Kepatuhan wajib pajak belum secara maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dan kurangnya jumlah aparatur pajak yang tidak seimbang dengan jumlah wajib pajak.
3. Penerimaan PPh Badan pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua belum optimal, hal ini karena belum adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
4. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan masih dikategorikan rendah, karena dari jumlah SPT Tahunan yang disampaikan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 yaitu sebanyak 2656 lembar, jumlah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan hanya sebanyak 645 lembar atau hanya sebesar 24,29%
5. Dari perhitungan analisis rasio pada rasio vertikal rencana dan realisasi, total keseluruhan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 bila dijumlahkan menjadi 100%. Sedangkan pada rasio horizontal dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 mengalami naik turun. Berarti dalam hal ini antara

kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan berpengaruh dan berkaitan dengan Penerimaan PPh Badan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, penulis mengajukan beberapa saran atau usulan perbaikan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan harus lebih ditingkatkan, agar penerimaan PPh Badan dapat dioptimalkan.
2. Kepatuhan sumber daya aparatur pajak baik secara kualitas maupun kuantitas perlu diprioritaskan terutama di seksi PPh Badan mengingat besarnya volume dan jenis pekerjaan yang dilakukan.
3. Kegiatan penyuluhan dan pengawasan di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua perlu ditingkatkan terutama untuk wajib pajak yang baru agar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abut, Hilarius. *Perpajakan 2001*. Jakarta: Diadit Media. 2001.
- Ali, Muhammad. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Amani
- Brotodiharjo R, Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Aditama.
- Judisseno, Rimsky K. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: IND-HILL.CO. 1996
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Prasetya, Adinur dkk. 2006. *Tinjauan Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
- Subana, M. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Ceria, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: PT. ALFABETA, 2003.
- Waluyo. 2006. *Administrasi Pajak*. Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan terakhir Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.

LAMPIRAN



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- MEMPUNYAI PENGHASILAN :
- DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 - DARI SATU ATAU LEBIH PEMERIKI KERJA
 - YANG DIKIRAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
 - DARI PENGHASILAN LAIN

TAHUN PAJAK

BL TH NORMA

BL TH PEMBUKUAN

PERHATIAN

- SEBELUM MENYERAHKAN BUKU PERUMPAK PENERIMAAN
- ID ENTITAS KURUP ORANG PRIBADI, ENDANG, INTI, LAMTAM
- BERITANDA X DALAM
- KOTAK PERHATIAN YANG SESUAI

IDENTITAS	NPWP	:	:
	NAMA WAJIB PAJAK	:	:
	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	:	KLU
	NO. TELEPON/FAKSIMILI	:	:
	PERUBAHAN DATA	:	LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA

*) Pengisian kolom-kolom yang bersesuaian harus tanpa nilai di dalam kurung pada sheet buku petunjuk (1)

		RUPIAH *)
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Disi dari Formulir 1770 - 1 Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - 1 Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]	1
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Disi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang diampikan]	2
	3. PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA [Disi dari Formulir 1770 - 1 Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 3]	3
	4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dan luar negeri agar diisikan dan Lampiran Tersendiri, sheet buku petunjuk]	4
	5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5
	6. ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK	6
	7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (5 - 6)	7
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	8. KOMPENSASI KERUGIAN	8
	9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)	9
	10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TGL KW K/W PPh HBI	10
	11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 - 10)	11
C. PPh TERUTANG	12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh ANGGRA 11)	12
	13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	13
	14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	14
D. KREDIT PAJAK	15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Disi dari formulir 1770 - 1 Jumlah Bagian A kolom 7]	15
	16. <input type="checkbox"/> a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14-15)	16
	<input type="checkbox"/> b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	
	17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN b. PPh PASAL 25 AYAT (7) c. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) d. FISKAL LUAR NEGERI	a b c d
	18. JUMLAH KREDIT PAJAK (a+b+c+d)	18
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	19. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) TGL LUNAS (16-18) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) TGL BLN THN	19
	20. PERMOHONAN PPh telah Bayar pada 19 b mohon a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK	
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTNYA	21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTNYA DIHITUNG SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN : a. <input type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16 b. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI	21
G. LAMPIRAN	SELAN FORMULIR 1770 - 1 SAMPAI DENGAN 1770 - 14 WAJIB YANG DISI MAUPUN YANG TIDAK DISI HARUS DI LAMPIRKAN PULA	
	a. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS JIKA DIPERLUKAKAN	g. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTNYA
	b. <input type="checkbox"/> SSP LEMBAR NO. 3 PPh PASAL 29	h. <input type="checkbox"/> BASTAR BULANAN KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGJAWAB PAJAK
	c. <input type="checkbox"/> HEFACA DAN CAP LADA RUGI REKAPITULASI RUGIAN PERDARAN NETO	i. <input type="checkbox"/> FOTOKOPY TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI TERPILU
	d. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	j. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK KAWIN PISAH HERTA
	e. <input type="checkbox"/> SURAT SURUT MENDALAM ANGGARAN BELANJA DAN/ATAU LAMPIRAN KURUP ORANG PRIBADI	k. <input type="checkbox"/> SURAT JUNG ALIYAH NEHARIAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 KURUS BINTU LEBIH BAYAR/LEBIH KURUS TERPILU
	f. <input type="checkbox"/> FOTOKOPY FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 LEMBAR	l. <input type="checkbox"/>

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

WAJIB PAJAK KUASA

TANGGAL: _____

NAMA LENGKAP : _____

NPWP : _____

TANDA TANGAN

PERHATIAN: • SEBELUM MENYISIPKAN, AMPLIKASI, PESTUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK, DENGAN MENYERTAKAN MATA • BERHATU-HATI • BERHATU-HATI • KOTAK PUNYA YANG SESUAI

NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :

**BAGIAN A: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DANIATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)**

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA AKUNTAN PUBLIK :
NPWP AKUNTAN PUBLIK :
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NAMA KONSULTAN PAJAK :
NPWP KONSULTAN PAJAK :
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :

1.	PENGHASILAN DARI USAHA DANIATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL : a. PEREDAKAN USAHA b. HARGA POKOK PENJUALAN c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b) d. BIAYA USAHA e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d)	RUPIAH 1a 1b 1c 1d 1e
2.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF a. BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK c. PENGGANTIAN ATAU JIMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN f. PAJAK PENGHASILAN g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA h. SANKSI ADMINISTRASI i. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL j. BIAYA UNTUK MENCAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA l. JUMLAH (2a s.d. 2k)	2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i 2j 2k 2l
3.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF: a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA d. JUMLAH (3a s.d. 3c)	3a 3b 3c 3d
	JUMLAH BAGIAN A (1l + 2l + 3d)	4

1770 - 1

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TAHUN PAJAK

2 0

s.d

BL

TH

BL

TH

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
- PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA

 ORMA PEMBUKUAN

PERHATIAN

• SELEKSI MANAJEMEN PAJAK (SMP)

• PENYERANAN PERUSAHAAN (PP)

• BUKTI TANDA

• DOKUMEN

 PISPAK PENERANGAN DESKSI

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

**BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO)**

NO	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DAGANG			
2	INDUSTRI			
3	JASA			
4	PEKERJAAN BEBAS			
5	USAHA LAINNYA			
	JUMLAH BAGIAN B		JBB	

Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

**BAGIAN C: PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA
(Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dikenakan PPh Bersifat Final)**

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	BUNGA	
2	DIVIDEN	
3	ROYALTI	
4	SEWA	
5	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
6	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA	
7	PENGHASILAN LAINNYA	
	JUMLAH BAGIAN C	JBC

Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir 1770 Angka 3

PERHATIAN : • SEBELUM MENGIKHTISALAH BUKU PELUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN MURID CETAK / DIKETIK DENGAN TITIK HATI-HATI • BERI TANDA "X" DALAM POTAK PL HANYA YANG SESUAI

NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15 dst						
JUMLAH BAGIAN A					JBA	

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

- *) - DTP = PPh Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TAHUN PAJAK 2 0
BL TH BL TH
 NORMA PEMBUKUANDEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI BACA AKIBUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETHI DENGAN TINTA HITAM • BERTANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP : _____

NAMA WAJIB PAJAK : _____

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK / PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
1	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN DISKONTO SBI		
2	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK		
3	PENJUJALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4	HADIAH UNDIAN		
5	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS		
6	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD		
7	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH		
9	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
10	USAHA JASA KONSTRUKSI		
11	PENGHASILAN USAHA		
11a	PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM		
11b	PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK		
12	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL		
12a	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		
12b	PENGHASILAN ANAK CARI PEKERJAAN YANG TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN USAHA ATAU KEGIATAN DARI ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		
13	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
14	JUMLAH (1 s.d. 13)		
II	PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU		

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	SUMBER / JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
	JUMLAH BAGIAN B	JBB

BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

PENGHASILAN NETO ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	(Rupiah)

- DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

s.d
BL TH BL TH
 NORMA PEMBUKUAN

PETUNJUK • SILAHKAN MENULIS BACALAH DAN/ATAU PPh TAHUNAN PENGISIAN • ISH DENGAN KURIR/ CETAK KOPYE TRIPLE DAN ENTA HENTAM • BERTANDA "P" ISLAM (KOTAK PERMANEN) YANG SESUAI

NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst				
JUMLAH BAGIAN A		JBA		

BAGIAN B : DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst				
JUMLAH BAGIAN B			JBB	

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPA* DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR

1770 SS

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA
DENGAN PENGHASILAN BRUTO TIDAK MELEBIHI Rp. 30 JUTA
SETAHUN

TAHUN PAJAK

2 0

PERHATIAN : BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI
• LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2*
• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
• ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

IDENTITAS	NPWP													
	NA MA WAJIB PAJAK													
	PEKERJAAN													
	NO TELEPON							NO FAKS						
	PERUBAHAN DATA	<input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI						<input type="checkbox"/> TIDAK ADA						

JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN > Rp

JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN UTANG PADA AKHIR TAHUN > Rp

BERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya bertahukan diatas beserta lampiran lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja

TANDA TANGAN

TANGGAL

*1) Foto copy formulir 1721-A1 atau 1721-A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS

PERUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN 1770 SS UNTUK W/P OP YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA

- Wajib Pajak wajib mengisi dan menyerahkan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani
- Wajib Pajak melampirkan formulir 1721-A1 atau formulir 1721-A2 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS
- Wajib Pajak yang dapat menggunakan formulir ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas baik karyawan swasta maupun PHD yang menerima penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp 30 juta dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi
- Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampulkannya paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir
- Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,-
- Setiap orang yang karena kelalaiannya tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar
- Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

Kotorn identitas diisi sesuai dengan identitas Anda dalam formulir 1721-A1 atau formulir 1721-A2

Diisi dengan jumlah nilai perolehan dari seluruh harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Misal: Rumah, kendaraan bermotor, kebun, sawah, deposito, tabungan dan lain-lain

Diisi dengan jumlah seluruh utang yang diperoleh / dimiliki, termasuk utang bunga
Misal: Pinjaman bank atau koperasi

1770 SS SPT TAHUNAN
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA
DENGAN PENGHASILAN BRUTO TIDAK MELEBIHI Rp. 30 JUTA
SETAHUN

2 0

PERHATIAN : BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI
• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
• ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

IDENTITAS

NPWP

NA MA WAJIB PAJAK

PEKERJAAN

NO TELEPON

NO FAKS

PERUBAHAN DATA

LAMPIRAN TERSENDIRI

TIDAK ADA

JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN > Rp

JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN UTANG PADA AKHIR TAHUN > Rp

BERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya bertahukan diatas beserta lampiran lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja

TANDA TANGAN

TANGGAL

PERUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN 1770 SS UNTUK W/P OP YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA

- Wajib Pajak wajib mengisi dan menyerahkan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani
- Wajib Pajak melampirkan formulir 1721-A1 atau formulir 1721-A2 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS
- Wajib Pajak yang dapat menggunakan formulir ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas baik karyawan swasta maupun PHD yang menerima penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp 30 juta dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi
- Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampulkannya paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir
- Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,-
- Setiap orang yang karena kelalaiannya tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar
- Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

Kotorn identitas diisi sesuai dengan identitas Anda dalam formulir 1721-A1 atau formulir 1721-A2

Diisi dengan jumlah nilai perolehan dari seluruh harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Misal: Rumah, kendaraan bermotor, kebun, sawah, deposito, tabungan dan lain-lain

Diisi dengan jumlah seluruh utang yang diperoleh / dimiliki, termasuk utang bunga
Misal: Pinjaman bank atau koperasi

- MEMPUNYAI PENGHASILAN :
- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
 - DALAM NEGERI LAINNYA
 - YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA DAMALU BUKU PERUNTUK PENGOBISAN • ISI DENGAN HURUF CETAK SINGKAT DENGAN TINTA HITAM • BERTANDA "X" PADA (KOTAK PERMANEN YANG SESUAI)

IDENTITAS	NPWP	<input type="text"/>												
	NAMA WAJIB PAJAK	<input type="text"/>												
	PEKERJAAN	<input type="text"/>												
	NO. TELEPON	<input type="text"/>						NO FAKS	<input type="text"/>					
	PERUBAHAN DATA	<input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI						<input type="checkbox"/> TIDAK ADA						

A. PENGHASILAN NETO	1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (Dilisi akumulatif jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan)	1	
	2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Dilisi sesuai dengan Formulir 1770 S-1 Jumlah Bagian A 1)	2	
	3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar dilisi dan Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk)	3	
	4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	4	
	5 ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK	5	
	6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (4-5)	6	

B. PENGHASILAN KENA PAJAK	7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TKW <input type="checkbox"/> K/ <input type="checkbox"/> K/I/ <input type="checkbox"/> PH/ <input type="checkbox"/> HB/ <input type="checkbox"/>	7	
	8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)	8	

C. PPh TERUTANG	9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)	9	
	10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	10	
	11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)	11	

D. KREDIT PAJAK	12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (Dilisi dari Formulir 1770 S-1 Jumlah Bagian C Kolom 7)	12	
	13 a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	13	
	14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25	14a	
	b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)	14b	
	c. FISKAL LUAR NEGERI	14c	
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)	15		

E. PPh KURANG LEBIH BAYAR	16 <input type="checkbox"/> a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (13-15) TGL LUNAS <input type="text"/>	16	
	<input type="checkbox"/> b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) TGL <input type="text"/> BLN <input type="text"/> THN <input type="text"/>		
	17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGGAN DENGAN UTANG PAJAK		

F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA REBESAR	18	
	DIHITUNG BERDASARKAN a. <input type="checkbox"/> 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI		

G. LAMPIRAN	a. <input type="checkbox"/> Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21	d. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)
	b. <input type="checkbox"/> Daftar Susunan Keluarga yang menjadi Tanggungan Wajib Pajak	e. <input type="checkbox"/>
	c. <input type="checkbox"/> Surat Suroran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29	

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

WAJIB PAJAK KUASA TANGGAL

NAMA LENGKAP :

N P W P :

TANDA TANGAN

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
 (Tidak Termasuk Penghasilan Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final)

NO	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	Bunga	
2	Dividen	
3	Royalti	
4	Sewa	
5	Penghargaan dan Hadiah	
6	Keuntungan dari Perjualan / Pengalihan Herta	
7	Penghasilan Lainnya	
JUMLAH BAGIAN A		JBA

Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A
Angka (2)
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	Bantuan / Sumbangan / Hibah	
2	Warisan	
3	Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak Atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi	
4	Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa	
5	Penghasilan Lainnya yang Tidak Termasuk Objek Pajak	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

**BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN
DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH**

NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
dst						
JUMLAH BAGIAN C					JBC	

Catatan :

- *) DTP : Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 4, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran (tersebut)

(lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENYUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk
1770 S Bagian D angka (12)

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

N P W P

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO.	SLMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bunga Deposito, Tabungan dan Di rekening SBI		
2	Bunga/Diskontok Obligasi yang Dilaporkan Perdaganganannya di Bursa Efek		
3	Penjualan Saham di Bursa Efek		
4	Hadiah Undian		
5	Pasangan, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun yang Dibayar Sekaligus		
6	Honorarium atas Beban APBN/APBD		
7	Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan		
8	Sewa atas Tanah dan/atau Bangunan		
9	Bangunan yang Diterima Dalam Rangka Bangun Guna Serah		
10	Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final		
10a	Penghasilan Isteri dari Satu Pemberi Kerja		
10b	Penghasilan Anak dari Pekerjaan		
11	Penghasilan Lain yang dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final		
JUMLAH BAGIAN A		JBA	

BAGIAN B : DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6 dst				
JUMLAH BAGIAN B		JBB		

BAGIAN C : DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6 dst				
JUMLAH BAGIAN C			JBC	

D	PPh KURANG/ LEBIH BAYAR	II.	a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	(9-10) >	(Rupiah)
			b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)		
PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA II a. DISETOR TANGGAL					
E.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN UTK PERIODE PENUNDAAN PENYAMPAIN SPT TAHUNAN		a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	>	
			b. KOMPENSASI KERUGIAN	>	
			c. PENGHASILAN KENA PAJAK (a - b)	>	
			d. PPh YANG TERUTANG (Tarif Ps. 17 X Huruf c)	>	
			e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF a YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	>	
			f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (d - e)	>	
			g. PPh PASAL 25 : (1/12 X Huruf f)	>	
F.	PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		a. PPh FINAL	>	
			b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO	>	
G.	LAMPIRAN		BERSAMA INI DILAMPIRKAN :		
			<input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29		
			<input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA		
			<input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)		
			<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN SEMENTARA PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)		
			<input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
H.	PERNYATAAN		DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN SEBAGAI PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK PENGHASILAN TERUTANG DI ATAS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.		
			(Tempat)	(Tanggal)	
		<input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :		
		<input type="checkbox"/> KUASA	NAMA LENGKAP DAN NPWP :		
CATATAN UNTUK DINAS :					
1. DITERIMA TANGGAL :					
2. NAMA PETUGAS :					
3. N I P :					
4. TANDA TANGAN :					

F.1.1.32.11

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA

Jalan Pemuda No. 66 Lt. 2-3
 JAKARTA TIMUR 13220

Telepon : (021) 4722520, 4722225
 (021) 4722519
 Fax/III : (021) 4722161

DAFTAR KELENGKAPAN SPT TAHUNAN
PPH Badan (Formulir 1771)

NPWP :

TAHUN PAJAK : Tahunan Pembedulan

KODE PEMBUKUAN : Norma Pembukuan

Formulir

1771 - Iduk 1771 - I 1771 - II 1771 - III
 1771 - IV 1771 - V 1771 - VI

Lampiran

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 SSP Lbr3 - PPh Pasal 29 | <input checked="" type="checkbox"/> 7 Daftar Cabang Utama Perusahaan |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 Laporan Keuangan / Audit Report | <input checked="" type="checkbox"/> 8 BUT |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3 Daftar Penyusutan / Amortisasi FI | <input checked="" type="checkbox"/> 9 Surat Kuasa Khusus (Bila Dikuasakan) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4 Perhitungan Kompensasi Kerugian | <input checked="" type="checkbox"/> 10 Pendukung Penghitungan PPh Pasal 25 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 5 Pernyataan Transaksi Hub. Istimewa | <input type="checkbox"/> 11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 6 Daftar Fasilitas Penanaman Modal | <input type="checkbox"/> 12 |

Omzet : Rp.

PPh Terutang : Rp.

PPh Dipotong Pihak Lain : Rp.

PPh Dibayar Sendiri : Rp.

Angsuran PPh : Rp.

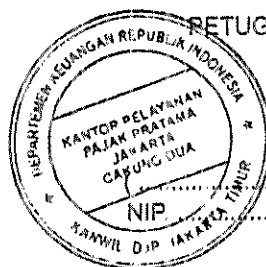
DISAMPAIKAN CLEH : Kapenpa WP Kantor Pos

SPT DIKEMBALIKAN UNTUK DILENGKAPI DENGAN :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jakarta,

PETUGAS PENELITIAN



PERHATIAN • SEBELUM MENGGISI BACA DAPILU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK DAN KETIK DENGAN TRIK HITAM • BERI TANDA "X" DALAM BLOTAK PELAKU YANG SESUAI

IDENTITAS PEMOTONG PAJAK	NPWP	
	NAMA	
	NO. TELEPON	NO FAKS
	JENIS USAHA	KLU
	NAMA PIMPINAN	
	PERUBAHAN DATA	<input type="checkbox"/> ADA, PADA LAMPIRAN TERSENDIRI <input type="checkbox"/> TIDAK ADA

NO	GOLONGAN PEGAWAI	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN (Orang)	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPH PASAL 21/26 TERUTANG (Rupiah)
				(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT) (Disi dan Formulir 1721-A)			
2	PEGAWAI TIDAK TETAP / PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (Disi dan Formulir 1721-B)			
3	JUMLAH (1 + 2)			
4	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (Disi dan Formulir 1721-A dan 1721-B)			4
5	PPh Pasal 21 DAN/ATAU PASAL 26 HARUS DISETOR (Angka 3 kolom 5 - Angka 4)			5
6	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG TELAH DISETOR			6
7	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (Karya Pokok Pajak)			7
8	JUMLAH (6 + 7)			8
9	a. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (Angka 5 - Angka 8)			9
	b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (Angka 4 - Angka 5)			
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 9 b DIPERHITUNGGAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 UNTUK BULAN TAHUN				

A. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSEKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT

B. LAMPIRAN

SELAIN LAMPIRAN 1721-A, 1721-A1 ATAU 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA

- SURAT SETORAN PAJAK (SSP) HEMBAR KE-3 PPh PASAL 21
- DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP YANG PPh-NYA DITANGGUNG PEMERINTAH
- SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)
- PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT
- DAFTAR BIAYA UNTUK WAJIB PAJAK YANG TIDAK WAJIB MEMASUKKAN SPT TAHUNAN PPh BADAN
- LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI
- FOTOKOPI IKTA KARYAWAN ASING
-
-

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) KUASA

(NAMA) _____ (TAMBAH) _____

Tgl. _____ Bln. _____ Thn. _____

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

NAMA LENGKAP _____

NPWP _____

NPWP PEMOTONG PAJAK

NAMA PEMOTONG PAJAK

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

No.	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPn PASAL 21 TERUTANG (Rupiah)	PPn DITANGGUNG PEMERINTAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
dst					

A1	Jumlah Pegawai Tetap yg ber-NPWP	P1	Orang		
A2	Jumlah Pegawai Tetap yg tidak ber- NPWP	P2	Orang		
A3	Jumlah Pegawai Tetap	PT	Orang		
B.	JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP	BT	Orang		
C.	JUMLAH A3 + B	CO	Orang		

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke - dari Halaman Lampiran-I

Catatan :

1. Pindahkan jumlah orang pada huruf C (kode CO) ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom 3.
2. Pindahkan jumlah C kolom 4 ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom 4.
3. Pindahkan jumlah C kolom 5 ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom 5.
4. Pindahkan jumlah C kolom 6 ke Formulir 1721 huruf A angka 4.



NOMOR URUT

NPWP PEMOTONG PAJAK

NAMA PEMOTONG PAJAK

ALAMAT PEMOTONG PAJAK

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / TK / HB

JABATAN MASA PEROLEHAN PENGHASILAN S D

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

	RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT	1
2. TUNJANGAN PPH	2
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	3
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21	6
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	7
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)	9
PENGURANGAN :	
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11
12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT	12
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)	13
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	14
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)	18
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	19
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21
22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22
23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	23
24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24
25. JUMLAH PPh PASAL 21 : <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23 - 24) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24 - 23)	25
26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	26

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK KUASA (Tempat) FOL BLN THN

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

NAMA LENGKAP

NPWP

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR

1721 - A2

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I - B

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

- PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEKAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA

- 1 Lembar 1 untuk KPP
- 2 Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
- 3 Lembar 3 untuk Pegawai

TARIKH TAKWIM

2 0

NOMOR URUT

NAMA INSTANSI / BADAN LAIN

NPWP BENDAHARA

NAMA BENDAHARA

ALAMAT BENDAHARA

NAMA PEGAWAI / PENSUNAN

NIP / NRP

NPWP PEGAWAI / PENSUNAN

ALAMAT PEGAWAI / PENSUNAN

PANGKAT / GOLONGAN

JABATAN

STATUS DAN JENIS KELAMIN

KAWIN

TIDAK KAWIN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

K1

TK1

HB1

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

S.D.

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

RUPIAH

• PENGHASILAN BRUTO :

1. GAJI POKOK / PENSUN

1

2. TUNJANGAN KETERI

2

3. TUNJANGAN AYAK

3

4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3)

4

5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

5

6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNKSIONAL

6

7. TUNJANGAN BERAS

7

8. TUNJANGAN KHUSUS

8

9. TUNJANGAN LAIN-LAIN

9

10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 9)

10

• PENGURANGAN

11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN

11

12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT

12

13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)

13

• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)

14

15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

15

16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

16

17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)

17

18. PPh PASAL 21 TERUTANG

18

19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG

19

20. JUMLAH PPh PASAL 21 :

20

a. YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)

b. YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)

B. • PEGAWAI TERSEBUT

DIPINDAHKAN

PINDAHAN

BARU

PENSUN

C. TANDA TANGAN BENDAHARA

(Tempat)

TGL

BLN

THN

Tanda Tangan dan Cap

BENDAHARA

NAMA

NIP/NRP

JIKA FORMULIR INI TIDAK BENDUKRUP, DAPAT DIRUBAH SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Nf WP PEMOTONG PAJAK

NAMA PEMOTONG PAJAK

RINCIAN GOLONGAN PENERIMAAN PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

No	GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH ORANG	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rupiah)	PPh PASAL 21 ATAU PASAL 26 TERUTANG (Rupiah)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
• PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL						
1	PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI					
2	PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMANGGUNG, DAN CALON PEGAWAI					
3	PENERIMA HONORARIUM, HADIAH, DAN SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI (TERMASUK YANG DITERIMA POL ASURANSI DAN PENJAJA BARANG DACANGAN YANG BUKAN PEGAWAI TETAP), BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN					
4	KOMISARIS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP.					
5	DISTRIBUTOR MLM/DIRECT SELLING DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA					
6	MANTAN PEGAWAI					
7	PESERTA PROGRAM PENSIUN					
8	ITINERARI PIHNGACAP, AKHIRAN ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NISIASIS, PENILAI DAN AKTUARIS					
• PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL						
9	PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA / JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS					
a	MANTAN PEGAWAI BUKAN PENERIMA PENSIUN					
b	TERMASUK PEGAWAI TETAP / PENERIMA PENSIUN PADA FORMULIR 1721-A					
10	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI, POLRI, DAN PENSIUNAN					
• PPh PASAL 26						
11	PEGAWAI / PEMBEJI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26					
12	JUMLAH *)					

*) jumlah kolom 3 = angka 1 s.d. 11 kec. 9b

Catatan :

1. Pindahkan jumlah pada kolom 3 (jumlah 1 s.d. 11 kecuali 9 b) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (3)
2. Pindahkan jumlah pada kolom (4) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (4)
3. Pindahkan jumlah pada kolom (6) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (5)
4. Pindahkan jumlah pada kolom (7) ke Formulir 1721 huruf A angka 4

D.1 1.32.50

1721 - C

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

- DAFTAR PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS, DAN TENAGA AHLI

TAHUN TAKWIM

2 0

NPWP PEMOTONG PAJAK :

NAMA PEMOTONG PAJAK :

BAGIAN A : PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS

NO	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh PASAL 21 / 26 TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
dst.					

BAGIAN B : TENAGA AHLI

NO	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JENIS KEAHLIAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rupiah)	PPh PASAL 21 / 26 TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
dst.						

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA
Jalan Pemuda No. 66 Rawamangun
Jakarta 13220
Telepon : (021)- 4722225-4722519
4722520
Faximili (021)- 4722161

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- 02 / WPJ.20 / KP.0501 / 2008
Tanggal : 1 April 2008

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Subroto Augustinus, S.Sos.
NIP : 060050137
Pangkat / Gol. : Penata Tk. I / III, d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Unit Kerja : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua

menerangkan bahwa :

Nama : Ilhami Trianasari
NPM : 03420011
Jurusan : Akuntansi (Pajak)
Sekolah : Universitas Darma Persada
Jl. Radin Inten (Terusan Casablanca) Pondok Kelapa, Jakarta

telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dari tanggal 03 Maret 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2008 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua yang beralamat di Jalan Pemuda No. 66, Rawamangun Jakarta Timur.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.







A.n. Kepala Kantor
Kepala Sub Bagian Umum



Subroto Augustinus, S. Sos.
NIP. 060050137

LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKIRPSI

NAMA MAHASISWA : Ulhami Trihanasari
NIM : 03420011
DOSEN PEMBIMBING : Drs. Boesi Setyo Hartono, AK, MM

KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I	12/9-2007	Proposal	
II	24/9-2007	Revisi Proposal	
III	21/10-2007	Bab I pendahuluan	
IV	14/12-2007	Revisi Bab I dan Bab II	
V	7/1-2008	Revisi Bab II dan Bab III	
VI	9/2-2008	Revisi Bab III	

Tanggal mulai bimbingan : 12 September 2007



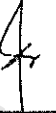
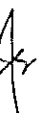
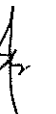

Tanggal selesai bimbingan : 24 Juni 2008

CATATAN :

Tanggal mulai bimbingan dicantumkan sejak dikeluarkannya surat ini.

LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKIRPSI

NAMA MAHASISWA : Ulhami Trihasari
NIM : 03120011
DOSEN PEMBIMBING : Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM

KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I	8 April 2008	Bab II	
II	22 April 2008	Bab IV	
III	12 Mei 2008	Revisi Bab IV	
IV	27 Mei 2008	Bab V	
V	10 Juni 2008	Revisi Bab V	
VI	24 Juni 2008	Final	

Tanggal mulai bimbingan : 12 September 2007

Tanggal selesai bimbingan : 24 Juni 2008

CATATAN :

Tanggal mulai bimbingan dicantumkan sejak dikeluarkannya surat ini.